

# Analisis Politik Luar Negeri Indonesia: Promosi 'Keamanan Manusia' di Palestina

**Tian Adhia Nugraha**

Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

**Audry Maura**

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## Abstrak

Penelitian ini fokus pada analisis tujuan dalam politik luar negeri, khususnya terkait konflik Palestina-Israel, berdasarkan karya Mohtar Mas'ood (1990). Dalam konsep politik luar negeri, keputusan, dan tindakan suatu negara diperinci sebagai tujuan dan tindakan dalam hubungan luar negeri. Melalui metode kualitatif, penelitian ini mengeksplor upaya pemerintah Indonesia mempromosikan keamanan manusia di Palestina dari 2014 hingga 2023. Data dikumpulkan dari media, jurnal, dan buku, lalu dianalisis untuk menyimpulkan hasil. Temuan menunjukkan tujuan politik luar negeri Indonesia dalam konflik tersebut adalah mengamankan keamanan manusia masyarakat Palestina yang mengalami krisis kemanusiaan. Perubahan paradigma dari keamanan negara ke keamanan manusia diperlukan untuk memastikan prioritas diberikan pada kesejahteraan manusia. Saat ini, realitas menunjukkan bahwa negara masih lebih memfokuskan pada keamanan negara tanpa memadukan perhatian pada manusia yang terdampak oleh serangan militer. Penelitian ini menyoroti bahwa tujuan politik luar negeri Indonesia dalam konflik Palestina-Israel adalah mempromosikan keamanan manusia, menekankan keamanan manusia daripada batas wilayah atau persenjataan dalam pendekatan non-tradisional.

**Kata Kunci:** politik luar negeri, keamanan manusia, Indonesia, Palestina.

## PENDAHULUAN

Terdapat tiga jenis pertanyaan dalam analisis politik luar negeri dalam buku *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* karya Mohtar Mas'ood (Mas'ood, 1990) di antaranya analisis tentang tujuan, sebab-akibat, serta struktur dan proses. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis politik luar negeri untuk melihat tujuan tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah Indonesia dalam konflik Palestina dan Israel. Peneliti juga menggunakan konsep 'keamanan manusia' untuk melihat upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan terhadap Palestina. Peneliti menganalisis upaya Indonesia dalam promosi keamanan manusia dari tahun 2014 sampai 2023. Peneliti berargumentasi mengenai urgensi perpindahan cara pandang dari keamanan negara menuju keamanan manusia sebagai

refleksi dari krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina.

Sebelum menganalisa politik luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia, peneliti akan meninjau konteks historis pendudukan Israel di wilayah Arab Palestina. Konflik Palestina - Israel memiliki perjalanan historis yang panjang, tetapi peneliti akan memulai melihat konteks pasca *Six-Day War* pada 1967. Kemenangan diperoleh Israel dalam perang tersebut di mana merugikan Mesir, Suriah, dan Yordania dengan kehilangan beberapa wilayahnya termasuk Jalur Gaza dan Tepi Barat (Oren, 1967). Perang tersebut menjadikan Israel menduduki wilayah yang saat ini disebut sebagai teritorial Palestina. Bila melihat kepada resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 181, sebenarnya Israel telah menduduki beberapa wilayah yang seharusnya dimiliki oleh Arab Palestina sejak Perang Arab-Israel 1948 (Krystall, 1998).

Peristiwa yang terjadi di Palestina menjadi fokus bagi Indonesia karena krisis kemanusiaan yang terjadi. Permasalahan mengenai pendudukan wilayah oleh Israel menjadi bentuk pelanggaran kemanusiaan. Masalah yang muncul di antaranya aneksasi beberapa wilayah di Tepi Barat, penyerangan Israel terhadap wilayah Palestina, dan pembatasan mobilitas masyarakat Palestina oleh Israel. Pendudukan wilayah dan pelanggaran

kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel bertentangan dengan prinsip luar negeri yang dimiliki oleh Indonesia di mana melalui Sila ke-2 Pancasila menyebutkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab, sedangkan Israel melakukan tindakan yang melanggar kemanusiaan (Dewantara et al., 2023).

Pada Oktober 2023, konflik bersenjata kembali terjadi di wilayah Palestina. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel menyatakan bahwa Israel sedang “berada dalam perang” (Hutchinson, 2023). Setelah penyerangan tersebut, Israel mendeklarasikan perang melawan Hamas. Beberapa upaya dilakukan oleh Israel termasuk memutus aliran dan pasokan listrik ke Gaza. Hal tersebut menyebabkan masyarakat Palestina yang berada di jalur Gaza mengalami kegelapan. Media *Reuters* pada 12 Oktober 2023 menyebutkan bahwa 2,3 juta orang di jalur Gaza tidak memiliki listrik dan air (Al-Mughrabi, 2023). Pemutusan pasokan listrik dan air menyebabkan keamanan manusia masyarakat Palestina terancam. Pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel tidak sampai disitu. Israel melakukan pengeboman terhadap wilayah Palestina yang menurut pemerintah Palestina telah menewaskan lebih dari 3,000 orang (Gritten, 2023). Serangan yang dilakukan merupakan sebuah pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional di

mana terdapat warga sipil yang terbunuh akibat dari serangan Israel.

Selain dari penyerangan militer yang dilakukan oleh Israel, pada tahun-tahun sebelumnya, Israel telah melanggar keamanan manusia masyarakat Palestina seperti aneksasi wilayah di Tepi Barat. Penggusuran secara paksa menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia di mana manusia yang tinggal di suatu wilayah dipaksa untuk pindah. Aneksasi yang dilakukan oleh Israel terhadap wilayah Palestina terjadi sejak tahun 1972 (Alsaafin, 2021). Salah satu wilayah dengan terjadinya aneksasi Israel adalah Sheikh Jarrah yang berada di Tepi Barat (Amnesty International, 2022). Peneliti sebelumnya telah menampilkan konteks pasca *Six-Day War* di mana Israel menduduki wilayah Tepi Barat. Pendudukan tersebut menjadikan Israel lebih mudah untuk mencaplok wilayah Palestina, karena Israel menjadi aktor yang menguasai wilayah tersebut.

Indonesia telah membangun jejak sejarah yang kuat dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Sejak pernyataan tegas Soekarno pada tahun 1962 hingga saat ini, Indonesia mempertahankan sikap menentang penjajahan Israel dan konsisten dalam mendukung hak kemerdekaan bangsa Palestina. Penolakan terhadap proklamasi negara Israel pada 1948 mencerminkan kecaman terhadap tindakan

merampas tanah Palestina. Sejak masa Soekarno hingga saat ini, Indonesia terus mengupayakan pengakuan kemerdekaan Palestina, bahkan tanpa adanya hubungan diplomatik dengan Israel. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia aktif membawa isu kemerdekaan Palestina ke berbagai forum internasional. Melalui pertemuan GNB, KTT ASEAN-PBB, dan forum internasional lainnya, Indonesia terus mendesak dukungan global untuk proses kemerdekaan Palestina (PTRI Jenewa, 2023; Sari, 2016a; Sinaga, 2019).

Pada tahun 2018, serangan Israel di Timur Tengah memicu respons keras dari Indonesia (CNN Indonesia, 2018). Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan komitmen Indonesia untuk mendukung perjuangan masyarakat Palestina, bukan hanya secara retorika, tetapi juga melalui bantuan langsung dan partisipasi aktif dalam OKI. Indonesia turut mengorganisir Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa OKI di Istanbul sebagai bentuk solidaritas internasional menentang kebijakan kontroversial Amerika Serikat (Kuwado, 2017). Dalam konteks politik luar negeri, Indonesia di DK PBB menyoroti pentingnya diplomasi politik dan perdamaian, termasuk perhatian khusus pada isu Palestina. Indonesia menjunjung tinggi prinsip inklusivitas, komprehensivitas, dan penghargaan terhadap parameter

internasional dalam mencari solusi konflik Israel-Palestina.

Di tengah normalisasi hubungan beberapa negara Islam dengan Israel, Indonesia tetap teguh pada pendiriannya bahwa normalisasi tidak dapat terjadi tanpa pemenuhan hak kemerdekaan Palestina. Indonesia juga mengutuk keras tindakan Israel yang mengancam perdamaian melalui pembangunan pemukiman ilegal dan konstruksi terowongan. Saat ini, Indonesia terus berjuang untuk membela Palestina dalam menghadapi serangan yang terus berlanjut. Dalam menghadapi krisis terbaru, Indonesia menuntut penghentian segera kekerasan dan berupaya mencari solusi yang adil dan damai. Dengan menggandeng dukungan internasional, Indonesia berperan aktif untuk menciptakan perdamaian dan keadilan bagi rakyat Palestina.

Terdapat penelitian yang telah merangkum kebijakan politik luar negeri yang dimiliki oleh Indonesia, terutama penelitian yang fokus pada peran politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina. Mudore (2019) menunjukkan peran Indonesia dalam konflik Palestina-Israel. Indonesia menjadi co-sponsor, fasilitator, mediator, partisipator, inisiator, aktor, motivator dan justifikator dalam konflik yang terjadi di Palestina (Mudore, 2019, p.180). Satris (2019) menunjukkan dukungan Indonesia terhadap Palestina dalam

pengakuan Jerussalem sebagai ibukota Israel dengan mengambil langkah seperti melakukan koordinasi melalui Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Indonesia juga melakukan penekanan kepada dunia Internasional bahwa perlunya penghormatan status hukum Jerussalem berdasarkan hukum internasional (Satris, 2019, p.167). Saragih (2018) fokus pada upaya Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Beberapa upaya yang dilakukan Indonesia dalam kemerdekaan Palestina di antaranya Indonesia mengirimkan bantuan dana untuk keperluan *capacity building*, Indonesia menekankan kepada OKI untuk mendorong kemerdekaan Palestina dengan Jerussalem Timur sebagai ibukota Palestina, serta Indonesia membuka Konsulat Kehormatan di Ramallah untuk Palestina (Saragih, 2018).

Dari ketiga penelitian tersebut, Indonesia telah memiliki peran penting dalam upaya kemerdekaan Palestina. Peneliti menekankan kebaruan dalam penelitian ini melalui upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam politik luar negeri untuk mempromosikan 'keamanan manusia' individu dan masyarakat di Palestina. Penelitian sebelumnya hanya fokus pada negara sebagai aktor utama, namun penelitian ini ingin menunjukkan bahwa terdapat upaya Indonesia untuk melindungi keamanan manusia masyarakat Palestina. Peneliti akan menjawab pertanyaan terkait

“Apa tujuan politik luar negeri Indonesia dalam konflik Palestina-Israel?” dan “Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam mempromosikan ‘keamanan manusia’ individu ataupun masyarakat Palestina?”. Peneliti mencoba untuk mendalami tujuan politik luar negeri dan upaya politik luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia dalam krisis kemanusiaan di Palestina. Selain itu, peneliti akan menganalisis mengenai urgensi perubahan cara pandang dari keamanan negara menuju keamanan manusia dalam melihat krisis keamanan manusia yang terjadi di wilayah Palestina.\

## **KERANGKA TEORI**

### **Politik Luar Negeri**

Mengacu pada Jackson, Sorensen, dan Moller (2022), politik luar negeri merupakan sebuah keputusan yang terdiri dari tujuan dan tindakan yang dilakukan oleh suatu negara dalam menjalin urusan luar negeri, khususnya hubungan suatu negara dengan negara lain (Jackson dkk., 2022:250). Serupa dengan yang dikemukakan oleh Frankel (1968) bahwa politik luar negeri terdiri dari keputusan dan tindakan di mana melibatkan hubungan antara satu negara dengan lainnya (Frankel, 1968). Padelford dan Lincoln (1977) menitikberatkan bahwa politik luar negeri berisikan ejawantah dari sebuah tujuan dan kepentingan yang dimiliki oleh suatu negara (Padelford and Lincoln,

1977). Maka, politik luar negeri merupakan sebuah hasil maupun proses yang dilakukan oleh suatu negara dalam menentukan sikap ataupun tindakan yang berdasarkan pada tujuan dan kepentingan nasional dalam menjalin hubungan luar negeri bersama negara lain. Konsep mengenai politik luar negeri akan peneliti gunakan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Indonesia terhadap konflik yang terjadi di wilayah Palestina, terutama untuk melihat kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap manusia di Palestina.

Mas’oed (1990, pp.356-361) dalam buku *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* mengemukakan tiga jenis pertanyaan dalam analisis politik luar negeri di antaranya: analisis tentang tujuan, analisis sebab-akibat, dan analisis struktur dan proses. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada analisa tentang tujuan. Analisis tentang tujuan dimaksudkan untuk mengetahui maksud dari suatu kebijakan politik luar negeri, misi suatu organisasi, atau motivasi aktor politik luar negeri (Mas’oed, 1990, p.356). Peneliti fokus pada pertanyaan: “Apa tujuan dari suatu tindakan”. Melalui bantuan analisis tentang tujuan, peneliti mendalami tujuan politik luar negeri Indonesia kepada Palestina dalam pemenuhan ‘keamanan manusia’ masyarakat Palestina.

### **Keamanan Manusia**

Selain menggunakan konsep politik luar negeri, peneliti menggunakan konsep 'keamanan manusia' untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengupayakan keamanan manusia di Palestina. Keamanan manusia berbeda dengan keamanan negara dalam konsepsi keamanan tradisional. Keamanan tradisional menurut Buzan, Waever, dan de Wilde (1998) berhubungan dengan militer dan politik, tetapi keamanan manusia berhubungan dengan terciptanya rasa 'aman' bagi kehidupan manusia (Buzan dkk., 1998). Pendekatan mengenai keamanan manusia muncul pasca perang dingin bersama dengan perpindahan dari keamanan tradisional menuju keamanan non-tradisional. Keamanan non-tradisional memberikan fokus yang berbeda dengan keamanan tradisional di mana hanya fokus pada negara dan militer. Keamanan non-tradisional fokus pada kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat yang terganggu salah satunya karena penggunaan kekuatan militer (Anthony, 2016).

Haq (1994) mengemukakan konsep baru yang membicarakan mengenai keamanan yang tercermin dari kehidupan masyarakat, bukan pada persenjataan yang dimiliki oleh negara. Haq melanjutkan bahwa 'keamanan' seharusnya fokus pada keamanan manusia bukan negara,

keamanan individu bukan wilayah, keamanan melalui pengembangan bukan melalui persenjataan, serta keamanan bagi setiap orang dalam pekerjaan, komunitas, dan lingkungannya (Haq, 1994 dalam Anthony, 2016). Kaldor (2011) mendefinisikan bahwa keamanan manusia merupakan penggabungan dari perdamaian dan hak asasi manusia. Terdapat tiga dimensi dari keamanan manusia di antaranya: keamanan manusia berkaitan dengan keamanan individu dan komunitas di lingkungan sekitar; keamanan manusia merupakan hubungan antara kebebasan dari rasa takut, kekurangan, serta bebas dari ketidakamanan fisik dan material; keamanan manusia merupakan keamanan yang berdasar pada aturan, bukan keamanan yang berbasis pada perang (Kaldor, 2011, pp.445-446). Maka, keamanan manusia merupakan serangkaian upaya yang fokus pada kedaulatan manusia sebagai individu maupun komunitas untuk terbebas dari rasa takut, kekurangan dalam ekonomi maupun sosial, atau terbebas dari pelanggaran kemanusiaan seperti kekerasan, perang, genosida, maupun kejahatan kemanusiaan lain.

Selama ini, penelitian mengenai politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina selalu fokus pada negara seperti kemerdekaan atau pendirian negara Palestina. Melalui konsep keamanan manusia, peneliti berupaya fokus pada

manusia sebagai target utama dalam politik luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia.

### **Urgensi Perubahan Cara Pandang Keamanan Negara menuju Keamanan Manusia**

Perubahan fokus dari keamanan negara menjadi keamanan manusia merupakan hal penting yang harus dilakukan saat ini. Perubahan fokus akan memberikan prioritas kepada manusia agar negara dan dunia internasional memberikan perlindungan kepada manusia, khususnya krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Pemenuhan keamanan negara akan berhubungan dengan kekuatan politik dan militer di mana akan mengeksklusi keamanan manusia. Ketika keamanan negara menjadi prioritas, persenjataan dalam aspek militer akan diperkuat, tetapi akumulasi senjata yang dimiliki oleh satu negara akan memberikan dampak terhadap negara tetangganya (Shameer, 2017, p.14). Kondisi tersebut akan menjadikan siklus yang tiada henti karena negara fokus untuk melindungi negaranya. Semakin banyak akumulasi persenjataan yang dimiliki oleh negara, semakin kuat kemampuan negara untuk menggunakan kekerasan (*use of force*). Negara sebagai aktor rasional memiliki kepentingan nasional untuk dicapai. Dengan kepemilikan senjata, negara akan menggunakannya untuk kepentingan nasionalnya. Kondisi ini terjadi dalam konflik

Israel-Palestina di mana Israel melakukan penyerangan terhadap wilayah Palestina untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya.

Pengeluaran militer seperti tank atau persenjataan militer yang berskala besar sebenarnya tidak memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Secara ekonomi, pengeluaran untuk militer merupakan sebuah “pengeluaran non-kontributif” karena tidak memberikan peningkatan pada hidup seseorang (Dumas, 2014 dalam Shameer, 2017). Pengeluaran untuk militer menjadi penting bagi keamanan negara, tetapi bertolak belakang dengan keamanan manusia. Kekuatan militer justru menjadi sebuah ancaman bagi kelangsungan hidup karena negara itu sendiri tidak dapat menjamin sebagai pelindung keamanan manusia. Ketika alokasi pendanaan diubah dari militer ke pengembangan ekonomi masyarakat, hal tersebut lebih memberikan manfaat yang lebih baik untuk tingkat kesejahteraan manusia.

Fokus pada keamanan negara akan merugikan manusia yang hidup di dalamnya atau manusia yang hidup diluar negaranya. Sekuritisasi dilakukan untuk menciptakan keamanan negaranya. Bila berbicara mengenai sekuritisasi maka akan berhubungan dengan pandangan *inside (friend)* dan *outside (enemy)*. Akhirnya

keamanan mengenai negara akan menjadikan batas-batas negara sebagai patokan dalam 'aman'nya suatu negara (Diken and Laustsen, 2004, p.92). Pandangan *inside* dan *outside* hanya akan membedakan manusia yang berada di dalam atau di luar yuridiksi geografis negaranya. Seakan-akan manusia yang berada di luar negaranya adalah ancaman dan musuh. Pemikiran *inside* dan *outside* menggambarkan penyerangan yang dilakukan oleh Israel kepada warga sipil Palestina. Israel sebagai sebuah negara menganggap manusia yang bukan warga negaranya atau di luar yuridiksi geografis negaranya dianggap sebagai ancaman dan musuh.

Perubahan dari keamanan negara menuju keamanan manusia akan memberikan prioritas kepada manusia. Realita yang terjadi negara masih mementingkan keamanan negara dengan mengabaikan manusia yang terdampak dari serangan militer. Dalam konteks konflik Israel dan Palestina, Israel memberikan penekanan pada keamanan negara, penggunaan kekuatan digunakan untuk mengendalikan secara politik dan militer terhadap Palestina. Masyarakat Palestina menjadi contoh ketika menghadapi ancaman tersebut, seperti serangan militer Israel pada tahun 2008, 2014, 2021, dan 2023 yang menyebabkan korban jiwa signifikan. Peneliti menekankan pada perubahan cara pandang

dari keamanan negara menuju keamanan manusia agar manusia terbebas dari ancaman, rasa takut (*freedom from fear*), dan keinginan (*freedom from want*), khususnya terbebas dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air, pakaian, dan tempat tinggal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti melakukan pendalaman terhadap upaya yang dilakukan Indonesia dalam promosi keamanan manusia di wilayah Palestina. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui media, jurnal, dan buku untuk mendalami konteks dalam penelitian ini. Jenis data yang dikumpulkan melibatkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti media, jurnal, dan buku, yang memberikan dasar yang kokoh untuk mendalami aspek-aspek yang relevan dalam penelitian. Data-data ini bersifat deskriptif dan dapat mencakup berbagai bentuk, seperti berita, artikel analisis, dan kebijakan pemerintah.

Untuk memastikan validitas data, peneliti melakukan kajian mendalam terhadap sumber-sumber yang digunakan, memverifikasi keakuratan informasi, serta memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dengan tujuan penelitian. Selain itu, pendekatan triangulasi data diterapkan dengan membandingkan informasi dari



berbagai sumber guna meningkatkan keabsahan hasil penelitian.

Proses analisis dimulai dengan pemilahan data, di mana peneliti menyortir dan menyusun informasi yang diperoleh sesuai dengan kerangka analisis yang telah ditetapkan. Kemudian, informasi dikelompokkan berdasarkan tema atau aspek yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Proses analisis dilakukan dengan cara mengartikan secara mendalam, mencari pola, tren, atau kontradiksi yang terungkap dari data tersebut.

Pada tahap akhir, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan ini mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap upaya Indonesia dalam mempromosikan keamanan manusia di wilayah Palestina, didukung oleh temuan-temuan yang muncul selama proses penelitian. Peneliti membuat interpretasi dan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dalam menyusun kesimpulan akhir (Cresswell, 2009).

## **PEMBAHASAN**

Dalam melaksanakan politik luar negerinya, Indonesia berlandaskan pada landasan Idiil, Konstitusional, dan Operasional (Widhiyoga and Harini, 2019, p.566). Pancasila menjadi landasan Idiil bagi politik luar negeri Indonesia di mana politik luar negeri

Indonesia harus mencerminkan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh Pancasila. Indonesia dalam landasan konstitusional yang mengacu pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama dan keempat memberikan gambaran yang jelas bahwa Indonesia berpihak pada kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Selain itu, batang tubuh UUD 1945 Pasal 11 dan 13 menjadi landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia. Secara khusus, Indonesia memiliki landasan yang mengatur prinsip politik luar negeri Indonesia yang tertuang dalam *Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri* (Indonesia) di mana pasal 3 menyebutkan bahwa "Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional". UU No.37 Tahun 1999 menjadi landasan operasional bagi Indonesia dalam politik luar negeri.

Melalui ketiga landasan tersebut, Indonesia dalam melakukan politik luar negeri berlandaskan pada prinsip bebas aktif yang berpihak pada kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Hatta (1976) mengemukakan bahwa 'aktif' bermakna bekerja lebih giat untuk perdamaian dan meredakan ketegangan yang terjadi diantara dua blok. Penelitian ini menganalisis politik luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Palestina,

khususnya dalam kasus krisis kemanusiaan di Palestina.

### **Krisis Keamanan Manusia di Palestina**

Melalui konsep keamanan manusia yang dikemukakan oleh Haq (1994), individu atau masyarakat Palestina tidak memiliki rasa 'aman' sebagai manusia yang hidup di wilayah Palestina. Kebutuhan dasar masyarakat Palestina telah dibatasi oleh Israel, hak untuk hidup telah terancam karena pengeboman maupun penyerangan militer, serta dalam kondisi perang masyarakat Palestina tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dalam pekerjaan, komunitas, maupun lingkungannya. Hak untuk hidup dengan rasa aman telah direnggut dari masyarakat Palestina seperti aneksasi yang dilakukan oleh Israel di Sheikh Jarrah (AFP, 2022). Bahkan selama bertahun-tahun masyarakat Palestina dihantui oleh pengeboman di wilayah Gaza.

Dimensi pertama keamanan manusia oleh Kaldor (2011) menyebutkan bahwa keamanan manusia berkaitan dengan keamanan individu dan komunitas di lingkungan sekitar. Keamanan manusia juga tidak menafikan ketika terdapat ancaman tradisional seperti ancaman yang datang dari militer dan mengancam kemanusiaan. Kondisi ancaman kemanusiaan akibat dari militer ini dialami oleh masyarakat Palestina. Pada tahun 2008, Israel melancarkan

serangan ke Gaza yang mengakibatkan 1,400 warga Palestina meninggal dunia. Pada tahun 2014, Israel melancarkan perang tujuh minggu yang menyebabkan lebih dari 2,100 warga Palestina di Gaza meninggal dunia. Kemudian pada tahun 2021, Israel melancarkan serangan ke Gaza yang menewaskan 260 warga Palestina di Gaza. Data tersebut diperoleh dari media *Aljazeera* yang merekam penyerangan militer Israel ke wilayah Palestina (Aljazeera, 2022). Melalui data tersebut, 'keamanan manusia' masyarakat Palestina mengalami ancaman.

Dimensi kedua dari keamanan manusia oleh Kaldor (2011) menyebutkan bahwa keamanan manusia merupakan hubungan antara kebebasan dari rasa takut, kekurangan, serta bebas dari ketidakamanan fisik dan material. Kaldor (2011, p.446) menegaskan bahwa keamanan manusia berhubungan juga dengan ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, penyerangan yang terjadi di wilayah Gaza pada tahun 2023 menyebabkan 80 persen populasi berada di bawah garis kemiskinan. Selain itu, Gaza telah kehilangan sebanyak 61 persen pekerjaan dengan estimasi kehilangan lapangan kerja sebanyak 182,000 pekerjaan (Aljazeera, 2023a). Bahkan banyak tempat yang dilindungi dibawah hukum humaniter terkena dampak serangan. Tempat ibadah seperti masjid dan gereja yang dikategorikan sebagai *cultural property* dalam *Regulation:*

Art. 27, *The Hague* terkena serangan militer Israel (Aljazeera, 2023b; Australian Financial Review, 2023). Serangan terhadap situs budaya ini mengganggu keamanan manusia dari dimensi kedua oleh Kaldor (2011). Dampak dari serangan Israel ke Gaza menyebabkan keamanan manusia yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, dan budaya terganggu. Dalam segi ekonomi, masyarakat Palestina telah kehilangan banyak pekerjaan, termasuk hilangnya lapangan pekerjaan. Selain itu, tempat budaya ataupun tempat yang menunjang keamanan manusia di dimensi kedua telah hancur karena pengeboman oleh tentara Israel.

Secara politik, Israel juga membatasi mobilitas warga sipil Palestina untuk meninggalkan wilayah Gaza. *Human Right Watch* (2022) menyebutkan bahwa pembatasan besar-besaran yang dilakukan oleh Israel untuk warga sipil Palestina menyebabkan lebih dari dua juta penduduk Palestina kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Pembatasan mobilitas ini seperti penjara terbuka (*open air prison*) bagi warga sipil Palestina. Sejak tahun 2007, Israel melakukan pembatasan kepada warga sipil Palestina untuk keluar melalui jalur Erez. Bahkan Israel melarang Otoritas Palestina untuk mengoperasikan bandara atau pelabuhan di Gaza. Pembatasan yang

dilakukan oleh Israel tidak sampai di situ saja, Israel juga membatasi masuk dan keluarnya barang dari wilayah Palestina (Human Right Watch, 2022).

Pada tahun 2023, Israel melakukan pemutusan pembangkit listrik untuk jalur Gaza di mana pemutusan ini akan berdampak pada hal lain seperti terbatasnya akses air, terputusnya layanan penting, dan bencana kesehatan masyarakat (Amnesty International, 2023). Kondisi Rumah Sakit Al-Shifa di wilayah Gaza mengalami kesulitan dalam memberikan pelayanan kepada pasien akibat pemadaman listrik (al-Batati and Deng, 2023). Pemadaman listrik dapat diibaratkan sebagai hukuman kolektif (*collective punishment*) di mana sanksi atau hukuman dijatuhkan kepada keseluruhan masyarakat. Seharusnya warga sipil Palestina tidak diikutsertakan dalam konflik ini. Bahkan, Hukum Humaniter Internasional (HHI) dengan tegas memberikan keamanan bagi warga sipil. Dalam *Article 14 of the 1977 Additional Protocol II* disebutkan bahwa membuat warga sipil kelaparan sebagai metode pertempuran dilarang.

Dimensi ketiga terkait keamanan manusia oleh Kaldor (2011) yaitu keamanan manusia merupakan keamanan yang berdasar pada aturan, bukan keamanan yang berbasis pada perang. Realita yang terjadi di wilayah Palestina menunjukkan sebaliknya, Israel telah melakukan

pelanggaran kemanusiaan di mana warga sipil menjadi korban dalam penyerangan yang terjadi di wilayah Gaza. Penyerangan yang terjadi di wilayah Palestina memberikan dampak yang buruk bagi kelangsungan keamanan manusia. Keamanan manusia seharusnya mengupayakan hubungan antar negara tanpa kekerasan. Keamanan manusia sebenarnya telah diatur melalui konvensi-konvensi internasional di antaranya: i) *The Universal Declaration of Human Rights* (1948); ii) *The Convention for the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (1951); iii) *The Geneva Conventions* (1949); dan iv) *The Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict* (1974). Namun, pelanggaran kemanusiaan tetap terjadi dengan penyerangan oleh Israel terhadap warga sipil Palestina. Keamanan manusia pada masa perang telah diatur dalam Hukum Humaniter Internasional, tetapi Israel tidak mematuhi aturan tersebut, dimana yang terjadi adalah keamanan yang berbasis pada perang bukan keamanan manusia yang berdasar pada aturan.

Bila melihat dalam ketiga dimensi keamanan manusia oleh Kaldor (2011) diketahui bahwa manusia yang berada di wilayah Palestina tidak memiliki kedaulatan, kesejahteraan, bahkan kebebasan dari ancaman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keamanan manusia masyarakat Palestina mengalami titik krisis. Dunia

Internasional seharusnya mulai sadar untuk fokus dalam menciptakan rasa aman dari ancaman ataupun ketakutan lain yang dialami oleh masyarakat Palestina. Disisi lain norma internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang tertuang dalam *the Universal Declaration of Human Right* (UDHR) telah memuat poin-poin dalam pemenuhan keamanan manusia seperti bebas dari diskriminasi, hak untuk hidup, dan kebebasan berbicara (Waltz, 2002). Dalam kondisi perang Hukum Humaniter Internasional telah mengatur lebih rinci dalam perlindungan manusia atau warga sipil. Kemanusiaan yang dialami oleh warga sipil di Palestina bermuara pada penyerangan yang dilakukan oleh militer Israel. Penyerangan tersebut mengarah pada warga sipil yang seharusnya dilindungi oleh konvensi internasional yang mengatur mengenai peperangan.

### **Sikap Indonesia terhadap Krisis Kemanusiaan di Palestina**

Secara historis, Indonesia menjadi negara yang konsisten dalam mendorong kemerdekaan Palestina. Soekarno pada 1962 dengan tegas menyatakan bahwa "Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel". Indonesia tidak mengakui proklamasi negara Israel pada 1948 karena tindakan

Israel yang merampas tanah Palestina. Saat dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika pada 1955, Indonesia menolak Israel untuk ikut serta dalam konferensi tersebut. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Palestina pada 11 November 1988. Pada masa reformasi, Indonesia masih konsisten untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Sampai saat ini, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia menyatakan sikapnya untuk secara konsisten membawa isu mengenai kemerdekaan Palestina di berbagai pertemuan yang dihadiri, agar isu kemerdekaan Palestina mendapat perhatian dan dukungan internasional. Dalam Pertemuan Tingkat Menteri Komite Palestina negara-negara Gerakan Non-Blok (GNB) misalnya, yang dilaksanakan di Pulau Margarita, Venezuela, pada 15 September 2015, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendesak seluruh negara GNB untuk mendukung proses kemerdekaan Palestina. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga mendukung inisiatif Pemerintah Prancis untuk memulai kembali proses perdamaian Palestina. Indonesia merupakan satu dari 28 negara yang berpartisipasi dalam *Paris Meeting* pada 3 Juni 2016 (Putra, 2016). Pada KTT ASEAN-PBB di Laos tahun 2016,

dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyerukan agar ASEAN dan PBB memprioritaskan upaya untuk mencapai kemerdekaan Palestina. Presiden Jokowi juga menegaskan ASEAN dan PBB harus mendorong upaya perdamaian Palestina-Israel melalui *two-state solution* (Sari, 2016b).

Pada tahun 2018, situasi di Timur Tengah memunculkan keprihatinan global ketika setidaknya 289 warga tewas akibat serangan Israel (Aljazeera, 2018). Menyikapi hal ini, Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen keras untuk mendukung perjuangan masyarakat Palestina. Dukungan ini tidak hanya bersifat retorika, tetapi juga melibatkan upaya konkret baik melalui bantuan langsung maupun partisipasi aktif dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Pemerintah Indonesia terlibat dalam upaya diplomasi di OKI dengan tujuan memperkuat solidaritas antara negara-negara anggota. Sebagai bukti komitmennya, Indonesia turut mendorong penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa OKI di Istanbul pada bulan Desember 2017. Konferensi ini bertujuan untuk mengecam tindakan sepihak Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Pada forum ini, Indonesia bersama negara-negara OKI lainnya bersatu untuk

menentang kebijakan kontroversial tersebut (Hidayat, 2018).

Mengenai kebijakan politik luar negeri di masa pemerintahan Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengemukakan kebijakan tersebut kedalam "Prioritas 4+1". Diplomasi ekonomi menjadi prioritas pertama, diplomasi perlindungan menjadi prioritas kedua, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan menjadi prioritas ketiga, kontribusi aktif politik luar negeri di kawasan dan global menjadi prioritas keempat, serta penguatan infrastruktur menjadi prioritas plus satu. Melihat pada prioritas keempat bahwa Indonesia akan berperan aktif dalam politik luar negeri di kawasan dan global di mana pada tahun 2018, Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2019-2020. Keanggotaan DK PBB Indonesia tersebut merupakan yang ke-empat kalinya, setelah sebelumnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada tahun 1974-1975, 1995-1996, dan 2007-2008. Indonesia memiliki empat prioritas dan satu perhatian khusus di DK PBB, yaitu: i) memperkuat ekosistem/geopolitik perdamaian dan stabilitas global dengan mengedepankan dialog dan penyelesaian konflik secara damai; ii) meningkatkan sinergi antara DK PBB dengan organisasi kawasan dalam mengatasi konflik di kawasan; iii) meningkatkan kerja sama antara negara-

negara dan DK-PBB untuk memerangi terrorisme, ekstremisme dan radikalisme; serta iv) mensinergikan upaya penciptaan perdamaian dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu Indonesia juga memprioritaskan isu Palestina (Kementerian Luar Negeri, 2019a). Perhatian khusus terhadap isu Palestina mencerminkan sikap Indonesia untuk memperjuangkan keadilan dan solidaritas internasional dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

Pada bulan Mei 2019, Indonesia mendapatkan kesempatan menjadi Presiden DK PBB, dengan fokus pada peningkatan kapasitas misi penjaga perdamaian PBB. Salah satu acara penting selama Presidensi Indonesia tersebut adalah pertemuan informal dalam format *Arria Formula* di Markas Besar PBB, New York, pada tanggal 9 Mei 2019. Tema dari pertemuan ini adalah "Pemukiman dan Pemukim Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis Pelindungan, dan Penghalang terhadap Perdamaian." Pertemuan tersebut diselenggarakan Indonesia bersama dengan Kuwait dan Afrika Selatan. Dalam pertemuan ini, Indonesia menyerukan pentingnya mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pidatonya di pertemuan tersebut kembali menekankan posisi Indonesia sebagai mitra sejati untuk perdamaian, Indonesia akan terus berusaha

keras untuk memastikan agar masalah Palestina tetap menjadi salah satu fokus utama di PBB. Menlu meminta agar semua pihak tidak kehilangan harapan dan kemauan untuk menyelesaikan konflik melalui dialog dan negosiasi melalui multilateralisme (Kementerian Luar Negeri, 2019). Selama menjalankan keanggotaan tidak tetapnya di DK PBB, sikap Indonesia dipusatkan pada upaya untuk memastikan bahwa DK PBB tetap memberikan perhatian pada isu ini (*remains seized of the matter*). Upaya ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pertemuan rutin DK PBB tentang Palestina (Kementerian Luar Negeri, 2019c).

Sikap Indonesia terhadap Palestina ini dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dasar politik luar negeri, nilai-nilai kemanusiaan, dan keinginan untuk mendukung upaya perdamaian yang berkelanjutan. Pada Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri Negara-negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi tahun 2019, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menegaskan beberapa kriteria yang menurutnya sangat penting dalam merancang rencana perdamaian untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina. Secara khusus, Menlu RI menyoroti tiga aspek kunci yang harus diperhatikan. Pertama, adalah prinsip inklusifitas. Menurut Menlu RI, rencana

perdamaian harus melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik, memberikan ruang partisipasi bagi semua pihak yang bertikai. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak terkait. Kedua, adalah aspek komprehensif. Menlu RI menekankan pentingnya merancang rencana yang tidak mengorbankan hak-hak politik Palestina. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan, yang memperhitungkan kepentingan dan hak-hak rakyat Palestina. Ketiga, adalah penghargaan terhadap parameter yang telah disepakati secara internasional. Menlu RI menekankan pentingnya menghormati kerangka kerja dan parameter yang telah diakui oleh komunitas internasional dalam merancang rencana perdamaian (Gewati, 2019).

Pemerintah Indonesia juga mengecam keras tindakan Israel yang menghancurkan perumahan warga Palestina di Sur Bahir, Yerusalem Timur. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan keprihatinan mendalam Bangsa Indonesia terkait pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel dan konstruksi terowongan yang mengarah ke Al-Haram al-Sharif. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tindakan semacam ini dianggap sebagai aneksasi *de facto* dan dianggap dapat mengancam proses perdamaian (Meilanova,

2019). Di tengah normalisasi hubungan antara sejumlah negara Islam, termasuk Maroko, Bahrain, Persatuan Emirat Arab (PEA), dan Sudan, dengan Israel, Indonesia tetap teguh pada sikap menolak normalisasi tersebut (Nadira, 2020). Meskipun beberapa negara Islam telah memutuskan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, Indonesia mempertahankan pendekatannya yang menegaskan bahwa normalisasi tidak dapat dilakukan tanpa terwujudnya kemerdekaan Palestina.

Indonesia terus berkomitmen untuk membela Palestina dalam menghadapi serangan masif Israel yang mulai dilakukan kembali pada Oktober 2023. Indonesia mendesak agar kekerasan yang saat ini sedang berlangsung antara Israel dan Palestina segera dihentikan. Desakan Indonesia untuk mengatasi akar permasalahan, yaitu pendudukan ilegal Israel terhadap Palestina, menjadi salah satu fokus utama dalam upaya diplomasi. Serangan udara dan pengepungan yang dilakukan oleh pasukan Israel di Gaza yang telah merenggut lebih dari 5.000 nyawa warga sipil (Dikarma, 2023). Pemerintah Indonesia juga terus melakukan *marathon diplomacy* untuk mendapatkan dukungan dari berbagai negara. Upaya ini bertujuan untuk memobilisasi dukungan internasional guna memberikan tekanan pada pihak-pihak yang terlibat agar segera menghentikan kekerasan dan mencari solusi damai.

Dengan semua upaya ini, Indonesia berusaha memainkan peran konstruktif dalam mencari solusi yang dapat membawa perdamaian dan keadilan bagi rakyat Palestina di tengah krisis yang terus berlanjut.

### **Indonesia dalam Pemenuhan “Keamanan Manusia” Rakyat Palestina**

Peneliti menggunakan salah satu pertanyaan tentang ‘tujuan’ analisis politik luar negeri dari buku *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (1990) karya Mohtar Mas’oed. Bagian ini akan menganalisis mengenai tujuan Indonesia dalam politik luar negeri terhadap konflik Palestina dan Israel. Dalam setiap tujuan akan memiliki landasan dalam melakukan tindakan tertentu. Peneliti menyimpulkan melalui tiga landasan di antaranya Idiil, Konstitusional, dan Operasional yang dimiliki oleh Indonesia. Ketiga landasan tersebut mencakup kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Indonesia memiliki prinsip “Bebas-Aktif” yang bermakna Indonesia tidak terikat kepada negara manapun dengan kata lain Indonesia memiliki otonomi sendiri untuk menentukan arah politik luar negerinya. Dengan prinsip aktif, Indonesia menjadi negara yang ikut serta untuk mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Secara determinan,



politik luar negeri akan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor internasional, domestik, individu, dan lain sebagainya. Peneliti hanya fokus pada salah satu faktor domestik yaitu landasan tertulis dalam konstitusi negara.

Peneliti menganalisis bahwa salah satu tujuan politik luar negeri Indonesia dalam konflik Palestina-Israel adalah untuk mengamankan 'keamanan manusia' masyarakat Palestina. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa keamanan manusia individu dan masyarakat Palestina sedang mengalami titik krisis selama bertahun-tahun. Peneliti juga telah menyampaikan dimensi keamanan manusia menurut Kaldor, di mana dalam implementasinya, Indonesia telah mengambil beberapa tindakan pemenuhan dimensi keamanan manusia di Palestina.

Dalam dimensi keamanan individu dan komunitas di lingkungan sekitar, khususnya di sektor pendidikan, Indonesia telah menunjukkan komitmen nyata dengan memberikan beasiswa dan mengadakan pelatihan untuk masyarakat Palestina. Pada tahun 2018, Indonesia menyediakan 10 beasiswa bagi pemuda Palestina untuk menjadi penerbang (Kardi, 2018). Ditahun yang sama, Indonesia juga mengadakan program peningkatan kapasitas seperti pelatihan 'Workshop Internasional tentang Keuangan Mikro untuk Palestina'. Pada

tahun 2023 ini, pemerintah kembali memberikan beasiswa pendidikan untuk 22 pemuda Palestina di Universitas Pertahanan (Amanturrosyidah, 2023). Selain itu, sekolah juga dibangun oleh Indonesia dengan bantuan dari berbagai yayasan asal Indonesia yang fokus pada pendidikan untuk masyarakat Palestina. Haq (1994) juga menekankan pada 'keamanan' melalui pengembangan bukan melalui persenjataan. Makna pengembangan bila ditelisik akan cukup luas, tapi peneliti menggarisbawahi pada upaya Indonesia dalam membangun sekolah di Palestina sebagai cara agar masyarakat Palestina dapat mengembangkan dirinya dalam bidang pendidikan.

Indonesia juga memberi bantuan pada sektor kesehatan, pelayanan kesehatan yang diupayakan oleh Indonesia dengan cara membangun rumah sakit. Pembangunan rumah sakit ini merupakan upaya bersama baik itu pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia. Rumah Sakit Indonesia (RSI) di Bayt Lahiya, Gaza merupakan inisiasi dari Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) (Arisandi, 2016). Kemudian Rumah Sakit di Hebron, Tepi Barat, menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di Palestina (Kemenlu, 2020). Indonesia juga pernah memberikan bantuan kemanusiaan berupa Klinik Mata

(ophthalmology clinic) dan Klinik Telinga Hidung dan Tenggorokan (ear nose and throat/ENT clinic) untuk kamp pengungsi Palestina di Talbiyah. Bantuan ini merupakan kerja sama Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) dengan JHCO (Jordan Hashemite Charity Organization). Berkaitan dengan konflik terbaru yang terjadi pada bulan Oktober 2023, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa alat kesehatan, bahan makanan, serta peralatan kebutuhan dasar lainnya (Ulya, 2023).

Dalam rangka pemenuhan dimensi kebebasan dari rasa takut, kekurangan, serta keamanan fisik dan material, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya yang mencakup beberapa aspek. Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia mendirikan konsulat kehormatan Republik Indonesia (RI) di Ramallah, Palestina (Nursalikhah, 2016). Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat hubungan diplomatik, tetapi juga untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan sosial-budaya antara Indonesia dan Palestina. Pada tahun 2018, Indonesia mengambil langkah konkret dengan mendesak Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) untuk mengatasi serius masalah pengangguran di Palestina (Fjr, 2018). Langkah lain yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah pembebasan bea masuk untuk dua produk ekspor

unggulan Palestina, yaitu kurma dan minyak zaitun (Ahl, 2019). Kebijakan ini diimplementasikan sebagai wujud nyata dari komitmen Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi konflik yang terus berlangsung di wilayah tersebut. Pada tahun 2019, Indonesia turut berpartisipasi dalam "International Solidarity Meeting with the People and Workers of Palestine" di Jenewa, Swiss. Dalam forum ini, Indonesia menyerukan kepada masyarakat dunia agar mendesak Israel untuk menghormati dan melaksanakan hak-hak ketenagakerjaan rakyat Palestina. Pemerintah Indonesia mengungkapkan keprihatinan atas kondisi pekerja dan peluang kerja di Palestina yang terus memburuk akibat pendudukan ilegal Israel, yang mengontrol mobilitas, keuangan, dan perdagangan warga Palestina (Fitriyanti, 2019). Seluruh langkah ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk berkontribusi secara positif dalam pemenuhan dimensi kebebasan dan keamanan di Palestina, baik melalui upaya diplomatik, ekonomi, maupun sosial-budaya.

Dalam upaya mewujudkan dimensi keamanan yang berlandaskan pada aturan dan bukan pada perang, Indonesia konsisten menegaskan bahwa tindakan-tindakan yang diambil oleh Israel telah melanggar norma-norma hukum internasional dan resolusi PBB. Pemerintah Indonesia secara tegas mengutuk pelanggaran tersebut dan

menyuarakan dukungan kepada perjuangan Palestina untuk mencapai hak sipil, politik, dan ekososial sebagai negara merdeka. Indonesia memandang bahwa solusi untuk konflik Israel-Palestina adalah melalui pembentukan dua negara yang independen. Posisi ini sejalan dengan parameter yang telah disepakati secara internasional dan diamanatkan oleh resolusi PBB. Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya menghormati hak-hak rakyat Palestina, termasuk hak mereka untuk hidup dalam sebuah negara merdeka. Dukungan Indonesia untuk Palestina mencakup upaya diplomasi aktif di forum internasional seperti di OKI dan PBB.

Pada KTT Luar Biasa (LB) Organisasi Kerjasama Islam (OKI) ke-5 yang diadakan di Jakarta pada tahun 2016, negara-negara anggota OKI menyatakan dukungan mereka untuk rekonsiliasi Palestina. Kesepakatan ini terwujud dalam dua dokumen, yaitu "Jakarta Declaration," inisiatif Indonesia yang berisi langkah-langkah konkrit dari pimpinan dunia Islam, dan sebuah resolusi yang menegaskan komitmen OKI untuk mendukung Palestina dan Al-Quds Al-Sharif (Firdaus, 2016). Pada tahun 2022, Indonesia memainkan peran inisiatif dengan menginisiasi pertemuan OKI untuk membahas agresi yang dilakukan oleh Israel di Palestina yang terjadi pada saat itu. Dalam pertemuan tersebut, OKI menyepakati untuk

mendorong dimulainya kembali proses perdamaian menuju negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kotanya. OKI juga meminta aktor internasional, seperti Dewan Keamanan PBB, untuk segera mengambil langkah-langkah menekan dan menghentikan agresi Israel di Palestina. Sebagai langkah konkret, Indonesia kembali mengusulkan pelarangan impor produk-produk Israel ke pasar negara-negara anggota OKI (Irwinsyah, 2022).

Pada masa Presidensi Indonesia pada bulan Mei 2019 di PBB, kontribusi negara ini terhadap isu Palestina terlihat melalui berbagai inisiatif yang diambil dalam kerangka Dewan Keamanan PBB. Salah satu contoh yang mencolok adalah penyelenggaraan beberapa pertemuan, termasuk diskusi informal DK PBB dalam format Arria Formula mengenai Palestina pada tanggal 9 Mei 2019. Indonesia bekerja sama dengan Kuwait dan Afrika Selatan untuk menyelenggarakan pertemuan ini. Fokus utama pembahasan adalah pembangunan kawasan pemukiman ilegal oleh Israel yang merampas tanah milik rakyat Palestina, terutama terkait aspek hukum dan kemanusiaan, dengan penekanan pada Resolusi DK 2334 (2016). Selain itu, sebagai bagian dari usaha Indonesia untuk meningkatkan perhatian global terhadap isu Palestina, inisiasi

penyusunan *Press Statement Elected* 10 pada 20 November 2019 adalah langkah yang signifikan. Tujuan penyusunan pernyataan ini adalah untuk menciptakan *joint-statement* oleh 10 negara anggota tidak tetap DK PBB yang dengan jelas menyatakan bahwa pendudukan yang dilakukan oleh Israel adalah ilegal (Kementerian Luar Negeri, 2019c).

Pada situasi yang saat ini terjadi, Indonesia mendesak Majelis Umum PBB untuk menggelar sidang khusus membahas konflik yang sedang terjadi. Namun sidang pertama tersebut tidak menghasilkan keputusan yang konkret karena adanya perbedaan pendapat dari negara-negara anggota. Kegagalan menghasilkan keputusan ini, membuat Indonesia mendorong OKI untuk meminta PBB mengadakan kembali sidang khusus membahas serangan Israel ke Palestina. Sehingga pada tanggal 27 Oktober 2023, PBB kembali menggelar sidang khusus dan menghasilkan resolusi untuk merespons perang Israel-Palestina tersebut (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2023).

Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia tersebut merupakan wujud pemenuhan keamanan manusia bagi masyarakat Palestina, sebagai sebuah amanat konstitusi yang mengamankan penghapusan penjajahan serta kontribusi

dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Peneliti melihat inisiatif dan tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia merupakan perwujudan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip hukum internasional.

## **KESIMPULAN**

Dalam konflik Israel-Palestina, tujuan politik luar negeri Indonesia adalah mempromosikan "keamanan manusia" rakyat Palestina. Dengan tekad melindungi keamanan manusia, pemerintah Indonesia memusatkan upaya diplomasi kemanusiaan pada individu dan komunitas yang mengalami krisis. Penelitian menyimpulkan bahwa Indonesia telah mengadopsi pendekatan keamanan manusia untuk menfokuskan perhatian pada mereka yang terdampak krisis kemanusiaan. Upaya pemenuhan dimensi keamanan manusia di sektor pendidikan terlihat melalui beasiswa, pelatihan, dan pembangunan sekolah bagi masyarakat Palestina. Dalam sektor kesehatan, pembangunan rumah sakit dan bantuan kemanusiaan mencerminkan komitmen Indonesia untuk mendukung 'keamanan manusia'. Langkah-langkah diplomatik dan ekonomi, termasuk penyelenggaraan pertemuan OKI dan dukungan pada forum internasional, menunjukkan upaya Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.

Pemerintah Indonesia juga mengancam pelanggaran hukum internasional oleh Israel dan secara aktif mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Kontribusi positif Indonesia juga terlihat dalam perannya di PBB, termasuk presidensi pada Mei 2019 yang menyoroti isu Palestina dan upaya untuk mendesak sidang khusus PBB. Dengan mengambil langkah-langkah konkret, Indonesia berkomitmen untuk memastikan keamanan manusia di Palestina dan mewujudkan prinsip-prinsip kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa inisiatif pemerintah Indonesia mencerminkan komitmen pada norma-norma hukum internasional dan perjuangan untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat Palestina.

Tiga dimensi keamanan manusia yang dikemukakan oleh Kaldor (2011) berkaitan dengan keamanan individu dan komunitas di lingkungannya, kebebasan dari rasa takut, kekurangan, bebas dari ketidakamanan fisik dan material, serta keamanan yang berdasar pada aturan, bukan keamanan yang berbasis pada perang, secara keseluruhan tidak dimiliki oleh warga sipil Palestina akibat dari tekanan politik dan militer oleh Israel. Maka, keamanan manusia warga sipil Palestina mengalami titik krisis. Dunia internasional seharusnya telah menyadari untuk memulai beralih dari pandangan

keamanan yang tradisional menuju non-tradisional di mana fokus negara menjadi memberikan rasa aman terhadap manusia yang hidup di dalamnya, bukan tentang batas-batas wilayah maupun jumlah persenjataan. Realita yang terjadi, negara-negara di dunia Internasional masih fokus pada keamanan negara, hal tersebut menjadikan negara sebagai prioritas. Ketika keamanan negara menjadi sebuah prioritas maka pendekatan militer akan digunakan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Seharusnya pandangan negara-negara Internasional fokus pada pemenuhan keamanan manusia, ketika keamanan manusia telah menjadi fokus utama maka manusia akan memiliki rasa aman dari ketakutan dan ancaman.

## REFERENSI

- AFP, 2022. Israel police demolish Palestinian home in annexed east Jerusalem [WWW Document]. France 24. URL <https://www.france24.com/en/live-news/20220119-israel-police-demolish-palestinian-home-in-annexed-east-jerusalem> (accessed 11.15.23).
- Ahl, 2019. Indonesia Bantu Ekonomi Palestina [WWW Document]. Medcom.id. URL <https://www.medcom.id/ekonomi/mik>

- ro/ybDzGOvK-indonesia-bantu-ekonomi-palestina (accessed 11.16.23).
- al-Batati, S., Deng, C., 2023. Cut Off by Gunfire, Gaza's Al-Shifa Hospital Struggles to Keep Patients Alive [WWW Document]. The Wall Street Journal. URL <https://www.wsj.com/livecoverage/israel-hamas-war-gaza-strip-2023-11-11/card/cut-off-by-gunfire-gaza-s-al-shifa-hospital-struggles-to-keep-patients-alive-MFBDE7ciQjXw1Lx3egKQ> (accessed 11.14.23).
- Aljazeera, 2023a. Gaza loses 61 percent of jobs in Israel-Hamas war, UN agency says [WWW Document]. Aljazeera.
- Aljazeera, 2023b. Israel bombs Greek Orthodox Gaza church sheltering displaced people [WWW Document]. Aljazeera. URL <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/20/war-crime-israel-bombs-gaza-church-sheltering-displaced-people> (accessed 11.15.23).
- Aljazeera, 2022. Timeline: Israel's attacks on Gaza since 2005 [WWW Document]. Aljazeera. URL <https://www.aljazeera.com/news/2022/8/7/timeline-israels-attacks-on-gaza-since-2005> (accessed 11.9.23).
- Aljazeera, 2018. The events that shook the Palestinian territories in 2018 [WWW Document]. URL <https://www.aljazeera.com/news/2018/12/30/the-events-that-shook-the-palestinian-territories-in-2018> (accessed 11.15.23).
- Al-Mughrabi, N., 2023. Gazans bombarded by Israel have no hope and no escape [WWW Document]. Reuters.
- Alsaafin, L., 2021. What is happening in occupied East Jerusalem's Sheikh Jarrah? [WWW Document]. Aljazeera. URL <https://www.aljazeera.com/news/2021/5/1/what-is-happening-in-occupied-east-jerusalem-s-sheikh-jarrah> (accessed 12.29.23).
- Amanturrosyidah, O., 2023. Indonesia Berikan Beasiswa untuk 22 Anak Palestina Berkuliah di Unhan [WWW Document]. Kumparan.
- Amnesty International, 2023. Israel/OPT: Israel must lift illegal and inhumane blockade on Gaza as power plant runs out of fuel [WWW Document]. Amnesty International. URL <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/10/israel-opt-israel-must-lift-illegal-and-inhumane-blockade-on-gaza-as-power-plant-runs-out-of-fuel/> (accessed 11.14.23).

- Amnesty International, 2022. Israel's apartheid against Palestinians [WWW Document]. Amnesty International. URL <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2022/02/israels-system-of-apartheid/> (accessed 11.9.23).
- Anthony, M.C., 2016. *An Introduction to Non-Traditional Security Studies*. SAGE Publications, London.
- Arisandi, Y., 2016. Indonesia lantik konsul kehormatan pertama untuk Ramallah, Palestina [WWW Document]. Antara. URL <https://www.antaraneews.com/berita/549889/indonesia-lantik-konsul-kehormatan-pertama-untuk-ramallah-palestina> (accessed 11.10.23).
- Australian Financial Review, 2023. Israel bombs mosque in Gaza amid escalating tension [WWW Document]. Australian Financial Review. URL <https://www.afr.com/world/israel-bombs-mosque-in-gaza-amid-escalating-tension-20231009-p5eaxi> (accessed 11.15.23).
- Buzan, B., Wæver, O., de Wilde, J., 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- CNN Indonesia, 2018. Jokowi Kecam Serangan Raket Israel ke Jalur Gaza [WWW Document]. CNN Indonesia. URL <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181028105730-120-342036/jokowi-kecam-serangan-roket-israel-ke-jalur-gaza> (accessed 11.29.23).
- Cresswell, J.W., 2009. *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*, 3rd ed. SAGE Publication, California.
- Dewantara, J.A., Sulistyarini, Afandi, Warneri, Efiani, 2023. *Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina* Authors. *Jurnal Kewarganegaraan*.
- Dikarma, K., 2023. Gerilya Diplomasi Retno Marsudi demi Palestina [WWW Document]. Republika. URL <https://www.republika.id/posts/46983/gerilya-diplomasi-retno-marsudi-demi-palestina> (accessed 11.16.23).
- Diken, B., Laustsen, C.B., 2004. 7-11, 9/11, and Postpolitics. *Alternatives: Global, Local, Political* 29, 89–113.
- Firdaus, E., 2016. Indonesia Serukan Pembebasan Palestina di Forum OKI. *Tribun News*.

- <https://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/06/indonesia-serukan-pembebasan-palestina-di-forum-okl> (accessed 11.16.23).
- Fitriyanti, A., 2019. Indonesia serukan dunia desak Israel penuhi hak tenaga kerja Palestina [WWW Document]. Antara. URL <https://www.antarane.ws.com/berita/913418/indonesia-serukan-dunia-desak-israel-penuhi-hak-tenaga-kerja-palestina> (accessed 11.16.23).
- Fjr, 2018. Indonesia Desak ILO Atasi Masalah Pengangguran di Palestina [WWW Document]. Medcom.id. URL <https://www.medcom.id/internasional/eropa/8korZBDb-indonesia-desak-ilo-atasi-masalah-pengangguran-di-palestina> (accessed 11.16.23).
- Frankel, J., 1968. *The Making of Foreign Policy*. Oxford University Press, London.
- Gewati, M., 2019. Menlu RI Dorong Negara OKI Solidkan Dukungan ke Palestina [WWW Document]. Kompas.
- Gritten, D., 2023. Hospital blast in Gaza City kills hundreds - health officials [WWW Document]. BBC News. URL <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-67140250> (accessed 11.9.23).
- Hatta, M., 1976. *Kumpulan Karangan Jilid 1*, 2nd ed. Bulan Bintang, Jakarta.
- Hidayat, F., 2018. Jokowi Klaim Indonesia Berjuang Keras untuk Palestina dan Muslim Rohingya [WWW Document]. Warta Ekonomi. URL <https://wartaekonomi.co.id/read177043/jokowi-klaim-indonesia-berjuang-keras-untuk-palestina-dan-muslim-rohingya.html> (accessed 11.15.23).
- Human Right Watch, 2022. Gaza: Israel's 'Open-Air Prison' at 15 [WWW Document]. Human Right Watch. URL <https://www.hrw.org/news/2022/06/14/gaza-israels-open-air-prison-15> (accessed 11.15.23).
- Hutchinson, B., 2023. Israel-Hamas conflict: Timeline and key developments in month of war [WWW Document]. ABC News. URL <https://abcnews.go.com/International/timeline-surprise-rocket-attack-hamas-israel/story?id=103816006> (accessed 11.9.23).
- Irwinsyah, F., 2022. Indonesia Galang Dukungan untuk Palestina Melalui Pertemuan Luar Biasa OKI [WWW Document]. Kumparan. URL <https://kumparan.com/kumparannews/indonesia-galang-dukungan-untuk-palestina-melalui-pertemuan-luar->



- biasa-oki-1xxXOEGgYQx/full  
(accessed 11.16.23).
- Jackson, R., Sørensen, G., Møller, J., 2022. Introduction to International Relations: Theories and Approaches, 8th ed. Oxford University Press, New York.
- Kaldor, M., 2011. Human security. *Society and Economy* 33, 441–448. <https://doi.org/10.1556/SocEc.33.2011.3.1>
- Kardi, D.D., 2018. Indonesia Sediakan Beasiswa Penerbang Bagi Pemuda Palestina [WWW Document]. Cnn Indonesia. URL <https://kumparan.com/kumparannews/indonesia-berikan-beasiswa-untuk-22-anak-palestina-berkuliah-di-unhan-21XL55rXjMn/full> (accessed 11.16.23).
- Kemenlu, 2020. Indonesia Bantu Pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Hebron [WWW Document]. Kemenlu. URL <https://kemlu.go.id/portal/id/read/942/berita/indonesia-bantu-pembangunan-rumah-sakit-indonesia-di-hebron> (accessed 11.10.23).
- Kementerian Luar Negeri, 2019a. Keanggotaan Indonesia pada DK PBB. Kementerian Luar Negeri. URL [https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman\\_list\\_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb](https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman_list_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb) (accessed 11.14.23).
- Kementerian Luar Negeri, 2019b. Indonesia Serukan Penghentian Pembangunan Pemukiman Illegal Israel di Palestina [WWW Document]. Kementerian Luar Negeri. URL <https://kemlu.go.id/istanbul/id/news/404/indonesia-serukan-penghentian-pembangunan-pemukiman-illegal-israel-di-palestina> (accessed 11.14.23).
- Kementerian Luar Negeri, 2019c. Lensa Satu Tahun Indonesia di Dewan Keamanan PBB 2019. Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2023. Indonesia Dorong PBB Gelar Sidang Khusus Selesaikan Konflik Gaza [WWW Document]. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. URL <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/indonesia-dorong-pbb-gelar-sidang-khusus->

- selesaikan-konflik-gaza (accessed 11.16.23).
- Krystall, N., 1998. The De-Arabization of West Jerusalem 1947-50. *J Palest Stud* 27, 5–22. <https://doi.org/10.2307/2538281>
- Kuwado, F.J., 2017. Hadiri KTT Luar Biasa OKI di Istanbul, Ini yang akan Dikemukakan Jokowi. *Kompas*. URL <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/13/18274151/hadiri-ktt-luar-biasa-oki-di-istanbul-ini-yang-akan-dikemukakan-jokowi> (accessed 11.29.23).
- Mas'ood, M., 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. LP3ES, Jakarta.
- Meilanova, D.R., 2019. Indonesia Kecam Aksi Israel Hancurkan Rumah Warga Palestina. *Bisnis.com*.
- Mudore, S.B., 2019. PERAN DIPLOMASI INDONESIA DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA. *Jurnal CMES* 12, 170. <https://doi.org/10.20961/cmcs.12.2.37891>
- Nadira, F., 2020. Palestina Terima Kasih ke Indonesia, Tolak Hubungan Israel [WWW Document]. *Republika*. URL <https://internasional.republika.co.id/berita/qlh668377/palestina-terima-kasih-ke-indonesia-tolak-hubungan-israel?> (accessed 11.16.23).
- Nursalikhah, A., 2016. Konsulat Ramallah Tingkatkan Hubungan Ekonomi Indonesia-Palestina. *Republika*. URL <https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/16/03/24/o4jfcz366-konsulat-ramallah-tingkatkan-hubungan-ekonomi-indonesiapalestina> (accessed 11.16.23).
- Oren, M., 1967. The Revelations of 1967: New Research on the Six Day War and Its Lessons for the Contemporary Middle East. *Israel Studies* 10, 1–14.
- Padelford, N., Lincoln, G., 1977. *The Dynamics of International Politics*. Macmillan Company, New York.
- PTRI Jenewa, 2023. Indonesia Dorong Penghentian Perang di Palestina dalam Forum Perdagangan dan Pembangunan PBB/UNCTAD. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. URL <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5540/berita/indonesia-dorong-penghentian-perang-di-palestina-dalam-forum-perdagangan-dan-pembangunan-pbbunctad> (accessed 11.29.23).
- Putra, L.M., 2016. Indonesia Terus Dorong GNB untuk Dukung Kemerdekaan

- Palestina [WWW Document]. Kompas.
- Saragih, H.M., 2018. Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Mendukung Palestina sebagai Negara Merdeka pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan 3.
- Sari, A.P., 2016a. Di KTT ASEAN-PBB, Jokowi Singgung Upaya Kemerdekaan Palestina [WWW Document]. CNN Indonesia. URL <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160908093411-106-156897/di-ktt-asean-pbb-jokowi-singgung-upaya-kemerdekaan-palestina> (accessed 11.29.23).
- Sari, A.P., 2016b. Di KTT ASEAN-PBB, Jokowi Singgung Upaya Kemerdekaan Palestina. CNN Indonesia. URL <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160908093411-106-156897/di-ktt-asean-pbb-jokowi-singgung-upaya-kemerdekaan-palestina/> (accessed 11.14.23).
- Satris, R., 2019. Peranan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Palestina Pasca Pengakuan Jerusalem Sebagai Ibu Kota Israel. POLITEA 2, 161. <https://doi.org/10.21043/politea.v2i2.5884>
- Shameer, M., 2017. Power Maximisation And State Security. World Affairs: The Journal of International Issues 21.
- Sinaga, Y.A., 2019. Indonesia dorong negara GNB dukung kemerdekaan Palestina [WWW Document]. Antara. URL <https://www.antaraneews.com/berita/1134308/indonesia-dorong-negara-gnb-dukung-kemerdekaan-palestina> (accessed 11.29.23).
- Ulya, F.N., 2023. Kemenkes Kirim 7 Ton Bantuan Obat dan Makanan Bergizi ke Palestina [WWW Document]. Kompas.com. URL <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/04/17130961/kemenkes-kirim-7-ton-bantuan-obat-dan-makanan-bergizi-ke-palestina> (accessed 11.10.23).
- Waltz, S., 2002. Reclaiming and rebuilding the history of the Universal Declaration of Human Rights. Third World Q 23, 437–448. <https://doi.org/10.1080/01436590220138378>
- Widhiyoga, G., Harini, S., 2019. Identitas Politik Luar Negeri Indonesia di Masa Reformasi (1999-2014). Research Fair Unsri 3.